



Pengaruh *Gini Ratio* dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Okta Aking Dwi Padmono¹

¹Universitas Islam Indonesia, Indonesia

*Penulis Korespondensi: oktapadmono1@gmail.com¹

Abstract. Poverty, according to the World Bank (2000), is defined as "poverty is pronounced deprivation in well-being," meaning that poverty is the loss of well-being. This study aims to analyze the impact of income distribution inequality and the Human Development Index (HDI) on poverty in Indonesia. The research utilizes data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) report. The study focuses on 34 provinces in Indonesia between 2022 and 2024, examining income inequality and human development quality. The data analysis method used is panel data regression, which allows for analyzing the effects of these variables simultaneously. The findings of this study are: (1) income distribution inequality has a significant impact on poverty levels, indicating that the higher the income inequality, the higher the poverty rate in Indonesia; and (2) the Human Development Index (HDI) also affects poverty levels. The higher the HDI, the lower the poverty rate, suggesting that improvements in education, health, and well-being can reduce poverty. These findings emphasize the importance of reducing income inequality and improving human development quality as effective strategies to decrease poverty in Indonesia. Policies focused on equitable development and improving the quality of life for communities are essential for achieving more widespread well-being across all provinces.

Keywords : Economic Inequality; Human Development; Human Development Index; Income Inequality; Poverty

Abstrak. Kemiskinan menurut World Bank (2000) didefinisikan sebagai "poverty is pronounced deprivation in well-being," yang bermakna bahwa kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Objek penelitian ini adalah 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2022-2024, dengan fokus pada analisis ketimpangan pendapatan dan kualitas pembangunan manusia. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah regresi data panel, yang memungkinkan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut secara bersamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ketimpangan distribusi pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti bahwa semakin tinggi ketimpangan pendapatan, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia; dan (2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi IPM, semakin rendah tingkat kemiskinan yang terjadi, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dapat mengurangi kemiskinan. Temuan ini menegaskan pentingnya upaya pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan dan peningkatan kualitas pembangunan manusia sebagai strategi yang efektif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Kebijakan yang berfokus pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh provinsi.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia; Ketimpangan Ekonomi; Ketimpangan Pendapatan; Kemiskinan; Pembangunan Manusia

1. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu berkurangnya kesenjangan intra dan antar negara (Bappenas, 2024). Adapun target yang ditetapkan untuk mencapai pemerataan tersebut selama tahun 2018 – 2022 salah satunya yaitu penurunan koefisien gini (SDGs Center Universitas Brawijaya, 2024).

Koefisien gini sendiri merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur dan menghitung ketimpangan atau distribusi pendapatan di suatu wilayah (Sjafrizal, 2012). Distribusi pendapatan dikatakan merata jika angka koefisien gini mendekati nol (Yusuf, 2014).

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang fokus sedang dalam menjalankan Pembangunan ekonomi berkelanjutan menghadapi tantangan yang signifikan terkait ketimpangan pendapatan. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, akan tetapi angka ketimpangan pendapatan masih berfluktuasi perubahannya.

Jika ketidakmerataan pendapatan terus dibiarkan akan menghasilkan berbagai permasalahan baru pada masa depan yaitu inefisiensi ekonomi, bertambahnya jumlah penduduk miskin, melemahnya stabilitas sosial dan solidaritas serta memperkuat kekuatan politis golongan kaya yang dapat menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat (Todaro dan Smith, 2004; Fajrina, 2022). Mopanggga (2011) menjelaskan masalah ketimpangan pendapatan yang tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan semakin melebarnya disparitas sosial-ekonomi antar wilayah dan membesarnya konflik antar daerah. Salah satu Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan yaitu menerapkan kebijakan fiskal yang sehat melalui APBN. APBN merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatur penerimaan (berupa pajak) dan pengeluaran sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional dan distribusi pendapatan (Nasution, 2020). Selain itu, pelaksanaan kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dengan tujuan “*stabilitas atau pembangunan*” (Damanhuri dan Findi 2014).

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat adalah **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**. Tiga dimensi dalam komponen IPM adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Meningkatnya IPM, diharapkan masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta peluang ekonomi yang lebih luas. Hal ini secara teoritis berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Berbagai penelitian telah menunjukkan adanya hubungan negatif antara IPM dan tingkat kemiskinan, di mana provinsi atau wilayah dengan IPM yang tinggi cenderung memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah. Namun demikian, ketimpangan pembangunan antar daerah serta distribusi akses terhadap layanan publik masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan nasional berhasil ditekan hingga di bawah 10 persen, menunjukkan penurunan yang konsisten dari 10,14% pada 2021 menjadi 9,26% pada

2023 (Badan Pusat Statistik, 2023). Meskipun pencapaian ini cukup positif di level nasional, kenyataannya angka kemiskinan di berbagai daerah masih menunjukkan ketimpangan yang mencolok.

Selain kemiskinan, ketimpangan pendapatan antarindividu juga menjadi refleksi nyata. Indeks Gini nasional tahun 2023 tercatat sebesar 0,388. Namun, jika dilihat per provinsi, terdapat variasi yang cukup signifikan: Bangka Belitung mencatatkan tingkat ketimpangan terendah dengan indeks 0,245, sementara DIY mencatatkan ketimpangan tertinggi dengan angka 0,449 (BPS, 2023). Indeks yang mendekati angka 1 menunjukkan ketimpangan tinggi, sedangkan nilai mendekati nol mencerminkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Disparitas ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan belum sepenuhnya tercapai dan dapat menjadi hambatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Faktor lain yang erat kaitannya dengan kemiskinan adalah pengangguran. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mengakibatkan sulitnya masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Secara umum, angka pengangguran nasional turun dari 6,49% pada 2021 menjadi 5,32% pada 2023. Namun demikian, ketimpangan masih tampak jelas terutama pada kelompok penyandang disabilitas, yang tingkat penganggurannya mencapai 10,61%, hampir dua kali lipat dibandingkan kelompok nondisabilitas sebesar 5,29% (BPS, 2023). Fakta ini mencerminkan bahwa akses terhadap pekerjaan yang layak bagi difabel masih terbatas, dan intervensi afirmatif belum optimal.

Kemiskinan sering kali disertai dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Salah satu indikatornya adalah prevalensi stunting pada anak, yang menggambarkan kekurangan gizi kronis. Angka stunting nasional saat ini berada pada 21,5%, namun beberapa provinsi memiliki angka jauh lebih tinggi, seperti Nusa Tenggara Timur (37,9%), Sulawesi Barat (30,4%), dan Sulawesi Tenggara (30%) (BPS, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan gizi anak di masa pertumbuhan penting.

Dengan melihat berbagai indikator terkait kemiskinan, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Indonesia tidak hanya terlihat pada angka statistik semata, melainkan juga tersembunyi dalam berbagai aspek sosial lainnya. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap kemiskinan perlu lebih komprehensif.

Pencapaian target tersebut sangat bergantung pada efektivitas implementasi program-program di lapangan. Oleh karena itu, strategi pengurangan kemiskinan perlu diarahkan pada reformasi kebijakan jaminan sosial, peningkatan infrastruktur di kawasan timur Indonesia, pemberdayaan UMKM dan industri kecil, serta peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan.

Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan tingkat kemiskinan hanya 0,8%. Harapannya, tidak akan ada lagi bentuk “kemiskinan tersembunyi”, dengan terciptanya pemerataan pendapatan, akses kerja yang inklusif, dan pelayanan publik yang berkualitas.

Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan kemiskinan bersifat negatif dan signifikan. Artinya, peningkatan IPM cenderung diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. IPM yang lebih tinggi menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik dalam hal kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, yang pada gilirannya mengurangi potensi kemiskinan.

Menurut data BPS:Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2024 mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin atau 0,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,39. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2023 mencapai 74,39, meningkat 0,62 poin (0,84 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (73,77). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2022 mencapai 72,91, meningkat 0,62 poin (0,86 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (72,29).

2. LANDASAN TEORI

Konsep Kemiskinan

Terkait definisi kemiskinan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam. Todaro dan Smith (2007) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan dimana terdapat sejumlah penduduk tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs*) minimum dan mereka hidup di bawah tingkat kebutuhan minimum tersebut (Todaro dan Smith, 2007). Kemiskinan menurut World Bank (2000) didefinisikan sebagai “*poverty is pronounced deprivation in well being*” yang bermakna bahwa kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan. Sedangkan permasalahan inti pada kemiskinan ini adalah batasan-batasan tentang kesejahteraan itu sendiri. *United Nations Development Program* (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian “tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik” sebagai salah satu indikator kemiskinan. Selanjutnya Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam

kegiatan sosial-politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif, kemiskinan absolut dan kemiskinan struktural.

A. Kemiskinan relative

Kemiskinan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita” (BPS, 2015).

B. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin (BPS, 2015).

C. Kemiskinan structural

Kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”, Suyanto (1995). Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat (BPS, 2015).

Hubungan Distribusi Pendapatan dengan Kemiskinan

Distribusi pendapatan merupakan cerminan atas merata atau timbangnya tingkat pendapatan dan hal ini merupakan penentu utama kemiskinan. Dimana kemiskinan itu sendiri sangat ditentukan atas rata-rata pengeluaran perkapita penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan yang disebabkan atas menurunnya tingkat pendapatan tenaga kerja, secara tidak langsung menarik kelompok penduduk yang diawalnya memiliki pengeluaran rata-rata diatas garis kemiskinan menuju pada pengeluaran rata-rata dibawah garis kemiskinan.

Hubungan Indeks Pemngungan Manusia dengan Kemiskinan

Pengangguran terjadi karena pertambahan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan pertambahan kesempatan kerja yang ada. Dari sudut pandang makroekonomi, tingginya pengangguran merupakan permasalahan bagi perekonomian. Sebagian masyarakat mengalami pengangguran sehingga sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengangguran seringkali menjadi penghambat perekonomian karena menyia-nyiakan sumber daya dan mempengaruhi produktivitas dan pendapatan. Pendapatan yang lebih rendah menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Indikator-indikator Pengangguran seperti pertumbuhan ekonomi negara dan tingkat inflasi.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian terdapat dua model yang akan dilakukan pengujian. Adapun variabel dependent dan Penelitian ini menguji dua model analisis dengan fokus pada variabel-variabel tertentu. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kemiskinan, yang diukur berdasarkan persentase penduduk miskin di 34 provinsi di Indonesia selama periode 2022–2024. Variabel independennya mencakup Ketimpangan Pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada di Indonesia dalam kurun waktu yang sama.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Adapun menurut waktu pengumpulannya, jenis data yang digunakan yakni data panel.

Data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh ketimpangan pendapatan dan indeks pembangunan manusia (IPM) pada 34 Provinsi di Indonesia selama periode 2022-2024.

Regresi data panel menyediakan beberapa alternatif model estimasi. Tiga pendekatan utama yang digunakan dalam analisis data panel adalah common effect, fixed effect, dan random effect. Baik model common effect maupun fixed effect menggunakan metode estimasi Ordinary Least Squares (OLS), sedangkan model random effect menerapkan metode Generalized Least Squares (GLS) untuk proses estimasinya.

4. HASIL PENELITIAN

Panel Data Model Estimasi

Menganalisis data panel dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu metode *Common Effect Model* (CEM), metode *Fixed Effect Model* (FEM), metode *Random Effect Model* (REM). Dari hasil pengolahan Stata mendapatkan hasil sebagai berikut :

Adapun hasil estimasi dari setiap model regresi data panel tersebut, secara lebih jelasnya dapat terlihat pada uraian berikut:

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil *fixed effect models* yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji *Common Effect Models* (CEM)

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	102
Model	1048.8793	2	524.439649	F(2, 99)	=	35.97
Residual	1443.33273	99	14.5791185	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.4209
				Adj R-squared	=	0.4092
Total	2492.21203	101	24.6753666	Root MSE	=	3.8183
TK	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
GR	45.75915	8.688199	5.27	0.000	28.51988	62.99842
IPM	-.9003273	.1148746	-7.84	0.000	-1.128263	-.6723912
_cons	59.98592	8.091128	7.41	0.000	43.93137	76.04048

Sumber: Data Sekeunder Diolah, 2025.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil *fixed effect models* yakni sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji *Fixed Effect Models (FEM)*

Fixed-effects (within) regression	Number of obs	=	102			
Group variable: Id	Number of groups	=	34			
R-squared:	Obs per group:					
Within = 0.1968	min =		3			
Between = 0.4318	avg =		3.0			
Overall = 0.4208	max =		3			
corr(u_i, Xb) = 0.4013	F(2,66)	=	8.09			
	Prob > F	=	0.0007			
TK	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
GR	22.20598	8.8123	2.52	0.014	4.611654	39.8003
IPM	- .4480136	.1590453	-2.82	0.006	-.7655577	-.1304695
_cons	35.04918	12.31663	2.85	0.006	10.45823	59.64013
sigma_u	4.097922					
sigma_e	.86018725					
rho	.95779805	(fraction of variance due to u_i)				
E test that all u_i=0: F(33, 66) = 57.11					Prob > F = 0.0000	

Sumber: Data Sekeunder Diolah, 2025.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil *random effect models* yakni sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Random Effect Models (REM)

Random-effects GLS regression Group variable: Id	Number of obs = 102 Number of groups = 34
R-squared: Within = 0.1962 Between = 0.4280 Overall = 0.4177	Obs per group: min = 3 avg = 3.0 max = 3
corr(u_i, X) = 0 (assumed)	Wald chi2(2) = 34.27 Prob > chi2 = 0.0000
TK	Coefficient Std. err. z P> z [95% conf. interval]
GR	26.11372 7.652028 3.41 0.001 11.11602 41.11142
IPM	-.5973796 .1244809 -4.80 0.000 -.8413576 -.3534015
_cons	44.605 9.435819 4.73 0.000 26.11113 63.09886
sigma_u	3.8213734
sigma_e	.86018725
rho	.95177404 (fraction of variance due to u_i)

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2025.

Berdasarkan model persamaan Regresi Data Panel tersebut, pengujian data dilanjutkan guna menentukan model regresi data panel yang akan dipilih.

Tabel 4. Kriteria Pemilihan Model

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

$$TK[Id,t] = Xb + u[Id] + e[Id,t]$$

Estimated results:

	Var	SD = sqrt(Var)
TK	24.67537	4.967431
e	.7399221	.8601873
u	14.60289	3.821373

Test: Var(u) = 0

$$\underline{\text{chibar2}(01)} = 89.36 \\ \text{Prob} > \text{chibar2} = 0.0000$$

. hausman fe re

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) Std. err.
	(b) fe	(B) re		
GR	22.20598	26.11372	-3.907743	4.370709
IPM	-.4480136	-.5973796	.149366	.0989945

b = Consistent under H0 and Ha; obtained from *xtreg*.

B = Inconsistent under Ha, efficient under H0; obtained from *xtreg*.

Test of H0: Difference in coefficients not systematic

$$\begin{aligned} \text{chi2}(2) &= (b-B)'[(V_b-V_B)^{-1}](b-B) \\ &= 5.01 \\ \text{Prob} > \text{chi2} &= 0.0816 \end{aligned}$$

Regresi yang terbaik

a. Uji antara common dan fixed effect (uji F)

hasilnya pada bagian bawah metode fixed. Nilai F sebesar 57,11 dengan probabilitas 0.000. Kita menolak Ho sehingga model yang tepat adalah model fixed

b. Uji antara common dan random effect (uji chi squares)

Hasilnya pada uji Brusch Pagan Lagrangin Multiplier test for random effect. Nilai Chibar2 89,36 dengan probabilitas 0.0000. Kita menolak Ho sehingga model yang tepat adalah model random

c. Uji antara fixed dan random effect (uji chisquars)

Hasilnya pada Hausman. Nilai Chi2 5,01 dengan probabilitas 0.0816. Kita menolak Ho sehingga model yang tepat adalah model fixed.

Persamaan

$$\text{KEMISKINAN} = 35,04918 + 22,20595 \text{KETIMPANGAN PENDAPATAN} - 0,4480136 \text{IPM} + eit$$

A. Evaluasi Hasil

Model yang terbaik adalah model fixed

- Evaluasi R². Fixed pada R-squared: overall sedangkan kalau fixed effect dengan Rsquared: within : 0.1968
- Uji kelayakan model fixed effect menggunakan uji F karena estimasinya memakai OLS. Prob F = 0.0000 sehingga kita menolak Ho, artinya semua variabel independent (Variabel Ketimpangan Pendapatan dan Variabel IPM) yang kita gunakan secara bersama-sama mempengaruhi Kemiskinan.

B. Uji hipotesis (lihat probabilitas uji t)

Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan

- Berdasarkan Tabel 2 nilai koefesien regresi ketimpangan pendapatan sebesar 22,20598. Ketimpangan Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kemiskinan dengan $\alpha=5\%$
- Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan Tabel 2 nilai koefesien regresi IPM yakni sebesar -0,4480136. IPM berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan dengan $\alpha=1\%$.

5. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi di Indonesia, diperoleh koefisien regresi sebesar 26,11372 dengan tingkat signifikansi 5%. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, semakin besar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, semakin tinggi pula persentase penduduk miskin di suatu provinsi.

Peningkatan ketimpangan (misalnya ketika kelompok kaya semakin jauh meninggalkan kelompok miskin) menyebabkan kelompok berpendapatan rendah semakin sulit memperoleh akses terhadap sumber daya seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi hanya lebih banyak dirasakan oleh kelompok atas, sementara jurang sosial dan ekonomi semakin melebar.

Tingginya ketimpangan di sejumlah provinsi di Indonesia juga mencerminkan adanya perbedaan antarwilayah, baik dalam hal pendapatan per kapita, pembangunan, maupun pertumbuhan ekonomi. Perbedaan tersebut membuat kapasitas setiap daerah dalam mendorong pembangunan tidak sama. Arsyad (2016), ketimpangan antarwilayah muncul karena setiap daerah memiliki perbedaan dalam hal sumber daya, tenaga kerja, serta teknologi.

Pengaruh IPM terhadap tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian mengenai pengaruh pembangunan manusia terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi Indonesia menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar -0,4480136 dengan tingkat signifikansi 5%. Temuan ini mengindikasikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu provinsi cenderung menurunkan persentase jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan sejumlah peneliti sebelumnya, yaitu Fiskal & Wardani (2020), Lilik Andrietya et al. (2020), Desmawan et al. (2021), Rifkah & Nabila (2021), serta Ayu et al. (2021), yang menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka jumlah penduduk miskin cenderung menurun. Menurut R. Maulana et al. (2022), secara umum terdapat hubungan negatif antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan, yang berarti bahwa peningkatan IPM cenderung diikuti oleh penurunan angka kemiskinan.

Sementara itu, IPM memiliki hubungan positif dengan kondisi ekonomi secara umum, yang mengindikasikan bahwa semakin baik kondisi ekonomi suatu wilayah, maka semakin tinggi pula nilai IPM-nya.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil estimasi data panel, model terbaik yang dipilih adalah *fixed effect models* (FEM). Selanjutnya, dari penelitian mengenai pengaruh ketimpangan pendapatan (X1) dan IPM (X2) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Indonesia tahun 2022–2024, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Ketimpangan pendapatan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 2022-2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ketimpangan pendapatan, semakin besar pula persentase penduduk miskin. 2) Indeks pembangunan manusia juga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 2022–2024. Dengan kata lain, kualitas hidup masyarakat yang lebih baik berkontribusi pada penurunan persentase penduduk miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, A. P., et al. (2023). The impact of unemployment and poverty on economic growth in the city of Palembang. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences*, 2(1). <https://doi.org/10.59066/ijoms.v2i1.319>
- Andykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2022). Analisis pengaruh PDRB, tingkat pengangguran, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 22(2), 170-180. <https://doi.org/10.20961/jiep.v22i2.57963>
- Ayu, I. G. A. P., Darma, G. S., & Yasa, I. N. M. (2021). Pengaruh IPM, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 10(6), 2678-2695. <https://doi.org/10.24843/EJEP>
- Bappenas. (2024). *Laporan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Damanhuri, D. S., & Findi, L. (2014). *Ekonomi Publik: Teori dan Praktik Anggaran Negara*. Jakarta: LPFE UI.
- Fajrina, N. (2022). Ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 20(1), 45-56.
- Mopanggga, R. H. (2011). Ketimpangan pendapatan dan disparitas antar wilayah di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 7(2), 123-137.
- Nasution, A. (2020). *Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2004). *Pembangunan Ekonomi* (Edisi ke-9). Jakarta: Erlangga.

- Alamanda. (2020). The effect of government expenditure on income inequality and poverty in Indonesia. *Info Artha*, 4(1), 1-11. <https://doi.org/10.31092/jia.v4i1.614>
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Asrol, A., & Ahmad, H. (2018). Analysis of factors that affect poverty in Indonesia. *Espacios*, 39(45).
- Ayu, D., Candra, F., Viphindrartin, S., & Diartho, H. C. (2021). Impact of government expenditure on poverty rate reduction in East Java Province. *WIGA JPIE*, 11(2), 120-127. <https://doi.org/10.30741/wiga.v11i2.606>
- Badriah, L. S. (2019). Ketimpangan distribusi pendapatan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Sustainable Competitive Advantage (SCA-9) FEB UNSOED*, 9, 232-248.
- Damanhuri, D. S., & Findi, F. (2014). *Ekonomi politik: Membongkar manipulasi kuasa dan rent-seeking mentality*. Penerbit Erlangga.
- Desmawan, D., Syaifudin, R., Mamola, R. M., Haya, H., & Indriyani, D. (2021). Determinant factors poverty of relativity in Banten Province: A panel data analysis. *Ecoplan*, 4(2), 131-141. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.387>
- Ebunoluwa, O. O., & Yusuf, W. A. (2018). Effects of economic growth on poverty reduction in Nigeria. *American Journal of Economics*, 9(5.1), 25-29. <https://doi.org/10.9790/5933-0905012529>
- Fajrina, A., & Priyarsono, D. S. (2022). Pengaruh kebijakan fiskal terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Indonesia. [Skripsi, IPB University]. Repository IPB. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/115793>
- Fiskal, M., & Wardani, D. K. (2020). Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 101-112.
- Garnella, R., MA, N. A. W., & Yulindawati. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM) dan kemiskinan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh. *JIMEBIS*, 1(1), 21-35. <https://doi.org/10.22373/jimebis.v1i1.104>
- Ginting, A. M., & Rasbin. (2010). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia sebelum dan sesudah krisis. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2(1), 279-312.
- Gwijangge, L., Kawung, G. M. V., & Siwu, H. (2018). Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(06), 45-55.
- Hindun, Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(3), 250. <https://doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721>
- Ibrahim Hasballah. (2021). Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan Provinsi Aceh di kabupaten/kota. *Jurnal Al-Fikrah*, 10(1), 38-48. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v10i1.70>

- Khairudin, Marliani, S., Aminah, Amna, L. S., & Soedarsa, H. G. (2021). Apakah korupsi berdampak buruk pada kemiskinan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 12(1).
- Kusumo, B. H. (2019). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, pendidikan dan upah minimum Kabupaten (UMK) terhadap kemiskinan Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(2).
- Lilik Andrietya, A., Pujiati, A., & Setyadharma, A. (2020). Determinants of poverty in Central Java Province 2013-2018. *Journal of Economic Education*, 9(1), 81-88. <https://doi.org/10.15294/jeec.v9i1.38671>
- Maulana, R., Pitoyo, A. J., & Alfana, M. A. F. (2022). Analisis pengaruh kemiskinan dan kondisi ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017. *Media Komunikasi Geografi*, 23(1), 12-24. <https://doi.org/10.23887/mkg.v23i1.39301>
- Muhammad, U. F., & David, J. (2019). Relationship between poverty and unemployment in Niger State. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(1), 71-78. <https://doi.org/10.15408/sjie.v8i1.6725>
- Nasution, M. E. (2020). *Ekonomi publik: Teori dan praktik*. Penerbit Rajawali Pers.
- Nisa, K., Wulandari, A., & Rahayu, R. L. (2020). Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2018. *Sorot: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(1), 55. <https://doi.org/10.31258/sorot.15.1.55-63>
- Omari, L. V., & Muturi, W. (2019). The effect of government expenditure on fiscal deficits in Kenya. *The International Journal of Science & Technoledge*, 7(2), 219-242. <https://doi.org/10.24940/theijst/2019/v7/i2/st1902-028>
- Pangestuty, F. W., & Prasetyiya, F. (2012). Linkages between public sector expenditure on economic growth and rural poverty of Indonesia. *J. Basic. Appl. Sci. Res.*, 2(3), 2347-2353. www.textroad.com
- Prasetyoningrum, A. K. (2018). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium*, 6(2), 217-240. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663>
- Rifkah, N. R., & Nabilah, R. (2021). Analysis of factors that improve welfare in Java Island. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 3(1), 15-26. <http://ejournal.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijier>
- Rodrik, D. (2007). Growth "Building Jobs and Prosperity in Developing Countries." *Department for International Development*, 1-25.
- Sagala, I. F., Romadhoni, A. F., Mardiana, A., Widayarsi, A., Simamora, D. R., Nurfadiah, D., Sembiring, E. A. B., Harahap, I. A., Siregar, M. E. E., Alif, M. F., Adella, N., Augustian, R. S., & Sihotang, R. F. (2024). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara menggunakan metode regresi linear berganda. *Konstanta: Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 2(2), 309-324. <https://doi.org/10.59581/konstanta-widyakarya.v2i2.3524>

- Sari, Y., Soleh, A., & Wafiaziza, W. (2021). Analisis pengaruh pendidikan dan penduduk miskin terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi. *Journal Development*, 9(2), 169-180. <https://doi.org/10.53978/jd.v9i2.182>
- SDGs Center Universitas Brawijaya. (2024). *Laporan Pencapaian SDGs Indonesia 2018-2022*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Seran, S. (2015). Hubungan antara pendidikan, penangguran dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. *JEKT*, 10(1), 59-71.
- Sitti Rachma Ramadhani Maskur, Hasan Aedy, Zainuddin Saenong, Tajuddin, Saemu Alwi, La Ode Samsul Barani. (2023). Pengaruh ketimpangan pendapatan, pengangguran dan pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2017-2021. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 8(1), 82-95. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPE>
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Yusuf, A. A. (2014). *Pengukuran dan Analisis Ketimpangan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sugiyarto, Mulyo, J. H., & Seleky, R. N. (2016). Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan rumah tangga di Kabupaten Bojonegoro. *Agro Ekonomi*, 26(2), 115. <https://doi.org/10.22146/agroekonomi.17264>
- Sukirno, S. (2013). *Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Raja Grafindo Pustaka.
- Suparman, Muzakir, Wahyuningsih, & Tallesang, M. (2021). Economic growth, income inequality, and poverty in Central Sulawesi. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 4(4), 14117-14125. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4080484>
- Suyanto, B. (1995). *Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Taruno, H. T. (2019). Public spending and poverty reduction in Indonesia: The effects of economic growth and public spending on poverty reduction in Indonesia 2009-2018. *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 4(2), 49-56. <https://doi.org/10.14710/ijpd.4.2.49-56>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2004). *Economic Development* (Twelfth ed., November issue). Pearson.
- Wenda, K. N., Wemaf, F. M., Takin, F., & Setianingsih, E. (2025). Analisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Papua. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 15(8), 1-12. <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i8.5023>
- Wali, M. I., Taher, A. R. Y., Wahyudi, H., & Murwati, A. (2022). Analisis pengaruh ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka terhadap keparahan kemiskinan. *JBEE: Journal Business Economics and Entrepreneurship*, 4(1), 34-48.